

PERAN MUSEUM MAJAPAHIT SEBAGAI MEDIATOR PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN INDUSTRI PEMBUATAN BATA

Atina Winaya

*Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jl. Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
atina.winaya@gmail.com*

Abstrak. Trowulan, situs arkeologi yang diduga merupakan ibukota Kerajaan Majapahit, mengalami kerusakan yang semakin hari semakin parah seiring dengan perkembangan industri pembuatan bata oleh masyarakat setempat. Museum Majapahit adalah salah satu pihak yang dapat tampil dalam upaya menekan, atau bahkan menghentikan, laju pertumbuhan dan perkembangan industri pembuatan bata tersebut. Penelitian dilakukan untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap pengembangan Museum Majapahit pada masa mendatang agar dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan pelestari budaya (baik pemerintah, arkeolog, akademisi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan masyarakat Trowulan, khususnya para pembuat bata. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif melalui observasi dan studi literatur, disertai analisis berdasarkan pendekatan *new museology* dan pendekatan *cultural resources management*. Berdasarkan hasil penelitian, Museum Majapahit diharapkan berperan sebagai media yang mampu menanamkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat mengenai pentingnya kelestarian Situs Trowulan. Situs yang lestari akan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap tiga aspek di dalam kehidupan masyarakat, yaitu aspek ideologis, akademis, dan ekonomis.

Kata Kunci: Pelestarian warisan budaya, Industri pembuatan bata, Majapahit, Trowulan

Abstract. *The Role of Majapahit Museum as a Mediator between Heritage Preservation and Brick-Making Industry.* Trowulan, the archaeological site which is believed as the former capital of the Majapahit Kingdom, currently suffers damages caused by the local brick-making industry. Majapahit Museum is one of the institutions which can suppress, or even stop, the growth and development of the brick-making industry. The aim of this research is to provide a recommendation for the development of Majapahit Museum in the future in order to work as a mediator that can bridge both interests between heritage preservation (government, archaeologists, academicians, and non-governmental organizations) and local citizens, especially the brick-makers. The methods used on this research is qualitative method through observation and literature study, followed by analysis based on new museology approach and cultural resources management approach. Based on the result, it is expected that the Majapahit Museum can play a key-role in raising the awareness of local citizens of the importance of the Trowulan site. The preserved site will provide benefits and positive impacts to three aspects in society, which are ideological, academic, and economic aspects.

Keywords: *Heritage preservation, Brick-making industry, Majapahit, Trowulan*

1. Pendahuluan

Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Bukti kebesaran Majapahit telah tertulis di dalam Kitab *Nāgarakṛtāgama* buah karya Mpu Prapanca (Mulyana 2006: 4-5). Selain bukti tertulis

berupa naskah kuno dan prasasti, terdapat pula peninggalan Majapahit berupa bangunan-bangunan monumental yang masih dapat disaksikan hingga kini, antara lain Gapura Bajang Ratu, Candi Wringin Lawang, Candi Tikus, Candi Brahu, dan Kolam Segaran. Beberapa bangunan tersebut berdiri di Situs Trowulan yang terletak

Naskah diterima tanggal 20 Juli 2015, diperiksa 5 Agustus 2015, dan disetujui tanggal 26 November 2015.

di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Berdirinya bangunan monumental, dalam jumlah yang cukup banyak di dalam satu wilayah, diyakini oleh para ahli arkeologi sebagai salah satu indikasi keberadaan ibu kota kerajaan kuno. Bukan hanya itu, tetapi temuan lepas dan tidak lepas seperti arca, tembikar, mata uang (*kepeng*), keramik, serta struktur bangunan, sumur, dan saluran air banyak ditemukan tersebar di penjuru Trowulan yang memiliki luas wilayah sekitar 9 x 11 km. Kebesaran Majapahit merupakan kebanggaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Keberadaan situs, bangunan, serta artefak peninggalan Majapahit sudah sepatutnya dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Selain sebagai sarana pembelajaran dan wisata, warisan budaya tersebut turut memberikan kontribusi penting dalam upaya memperkuat jati diri bangsa.

Situs Trowulan telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Cagar Budaya Nasional (kebudayaan.kemdikbud.go.id). Dengan demikian, semua situs yang berada di kawasan tersebut akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola KCBN (Ramelan dkk. 2015). Namun, Badan Pengelola KCBN Trowulan belum resmi terbentuk. Salah satu kendalanya adalah penetapannya yang relatif baru, yaitu kurang dari satu tahun, sehingga para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), maupun masyarakat, belum dapat merumuskan bentuk badan pengelola yang paling cocok untuk KCBN Trowulan (Ramelan dkk. 2015).

Saat ini, Situs Trowulan mengalami ancaman kerusakan yang cukup serius. Salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah berdirinya industri kecil berupa pabrik pembuatan bata (*linggan*) oleh masyarakat setempat yang tersebar di hampir seluruh wilayah Trowulan.

Aktivitas tersebut tentunya mengakibatkan kerusakan terhadap struktur bangunan dan artefak yang masih terkubur di dalam tanah. Padahal, peninggalan yang masih tersimpan di dalam tanah itulah yang menjadi kajian utama para arkeolog untuk mengungkap fakta sejarah dalam melengkapi sejarah Majapahit.

Selain sektor pertanian, mata pencaharian masyarakat Trowulan adalah pembuatan bata dengan bahan baku berupa tanah liat, baik yang digarap di lahan milik sendiri maupun secara sewa. Pengetahuan membuat bata telah diketahui dan berlangsung sejak lama. Oleh sebab itu, masyarakat Trowulan banyak yang bertumpu pada mata pencaharian tersebut yang dijalankan secara turun temurun. Pada tahun 1950-an sampai dengan tahun 1970-an, sebagian besar petani di kawasan Trowulan bercocok tanam di lahan kering yang tidak terjangkau saluran irigasi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, para petani juga melakukan pendulangan emas secara besar-besaran di lahan yang mereka kuasai. Setelah “deposit emas” dalam tanah dianggap habis disertai himbuan pemerintah untuk menghentikan kegiatan tersebut karena dianggap merusak situs, mereka justru beralih menjadi pencari bata merah yang sangat banyak ditemukan di wilayah Trowulan untuk ditumbuk menjadi “semen merah” (Atmodjo dkk. 2008: 37).

Pada tahun 1970-an, ketersediaan “bata Majapahit” berkurang, sehingga para pencari bata beralih profesi menjadi pembuat bata. Produk bata dari Trowulan dianggap berkualitas cukup baik sehingga permintaan pasar tidak pernah berkurang. Melalui hasil pendataan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, rata-rata setiap pabrik bata, menyerap tiga orang tenaga kerja, sehingga saat ini terdapat sekitar 9000 orang yang bekerja untuk menghasilkan bata. Setiap linggan memerlukan lahan seluas kurang-lebih 625 m² yang akan habis digali sedalam satu meter selama tiga tahun. Kerusakan lapisan tanah yang mengandung struktur atau artefak Majapahit sebagai dampak

industri bata di Trowulan diperkirakan seluas 6,25 hektar pertahunnya (Atmodjo dkk. 2008: 37).

Kerusakan Situs Trowulan semakin lama semakin bertambah parah seiring dengan berjalannya waktu. Para arkeolog dan pelestari budaya tidak dapat menutup mata bahwa di balik kerusakan tersebut, terdapat kepentingan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, perlu adanya peran serta pihak-pihak yang dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Museum Majapahit adalah salah satu pihak yang dapat tampil dan berperan sebagai mediator antara pelestari budaya (baik pemerintah, arkeolog, akademisi, maupun LSM) dengan masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pembuat bata.

Saat ini, Museum Majapahit dinilai belum berperan secara optimal dalam melakukan mediasi di antara kedua belah pihak. Perlu dilakukan eksplorasi terhadap peran serta museum dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan yang tengah terjadi di Trowulan. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan penanganan yang cepat dan tepat, maka peninggalan masyarakat Majapahit yang masih terkubur di dalam tanah lambat laun akan habis. Hal itu sangat disayangkan, mengingat bukti kebesaran Majapahit sudah sepatutnya dilestarikan keutuhannya agar dapat terus disaksikan oleh generasi yang akan datang.

Sebelum mempertanyakan permasalahan utama, perlu diketahui terlebih dahulu, *“bagaimana gambaran industri pembuatan bata di Trowulan?”* serta *“bagaimana konsep pelestarian warisan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat?”*

Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut akan menjadi dasar pemikiran guna menjawab permasalahan utama di dalam penulisan, yaitu *“bagaimana peran Museum Majapahit sebagai mediator yang menjembatani antara kepentingan pelestarian budaya dan masyarakat setempat, khususnya yang berprofesi sebagai pembuat bata?”*

Tulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai industri pembuatan bata di Trowulan serta penjabaran secara umum konsep pelestarian warisan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tujuan utama penulisan adalah untuk mengetahui gambaran mengenai peran Museum Majapahit sebagai mediator yang menjembatani antara kepentingan pelestarian budaya dan masyarakat setempat, khususnya yang berprofesi sebagai pembuat bata.

Hasil tulisan diharapkan dapat memberikan suatu rekomendasi terhadap pengembangan Museum Majapahit pada masa yang akan datang. Besar harapan bahwa pemahaman yang tertanam di dalam benak masyarakat Trowulan dapat menumbuhkan “ikatan batin” yang kuat, serta rasa cinta terhadap sejarah dan asal-usul nenek moyang, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan turut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan dan kelestarian situs.

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pada tahap pengumpulan data, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kondisi Museum Majapahit yang terletak di Jalan Pendopo Agung, Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain itu, pengamatan juga dilakukan terhadap aktivitas industri bata yang tersebar hampir di seluruh wilayah Trowulan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, artikel, dan laporan yang terkait dengan penulisan. Studi literatur dilakukan dalam rangka memperkaya informasi serta mendapatkan konsep-konsep untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Kemudian pada tahap pengolahan data, analisis dibagi ke dalam tiga sub bab agar dapat dipahami secara sistematis, yaitu Industri bata di Trowulan, Pelestarian warisan budaya yang bermanfaat bagi masyarakat, serta peran Museum Majapahit sebagai mediator. Sub bab pertama dan kedua bersifat deskriptif sesuai hasil observasi yang diperkuat dengan data literatur.

Sub bab ketiga bersifat deskriptif analitik yang didalami dengan menggunakan pendekatan *new museology* dan *cultural resources management*. Pendekatan *new museology* digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai definisi, peran, serta pengembangan museum modern secara umum. Pendekatan *cultural resources management* digunakan untuk memberikan masukan terhadap Museum Majapahit dalam berperan mengatasi konflik kepentingan di antara pelestari budaya dan masyarakat Trowulan, khususnya para pembuat bata.

Tahap yang terakhir adalah penafsiran data. Penafsiran data dilakukan dengan mengintegrasikan hasil-hasil analisis data. Hasil integrasi tersebut kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada permasalahan penelitian.

1.1 Pendekatan New Museology

Menurut *International Council of Museums* (ICOM), museum adalah suatu lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat, dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan, untuk tujuan-tujuan studi, pendidikan dan kesenangan, barang-barang pembuktian manusia dan lingkungannya (Sutaarga 1983: 19). Pada awalnya, museum-museum di Eropa dan Amerika Serikat hanya berorientasi terhadap penyajian koleksi yang dimilikinya (*object oriented*) (Asiarto 2007: 7). Kemudian pada tahun 1980-an, mereka mengubah orientasinya kepada pengunjung (*public oriented*) seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Asiarto 2007: 7). Menurut Vergo, konsep *old museology* atau museum tradisional terlalu menitikberatkan pada metodologi, seperti metode pengoleksian, perawatan, dan pameran, sedangkan konsep *new museology* lebih memfokuskan pada maksud dan tujuan atau maknanya (Haryono 2010). Stam menambahkan bahwa perbedaan

kedua konsep tersebut terletak pada munculnya peran informasi yang menjadi prioritas utama dalam visi dan misi museum, di samping keterkaitannya dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya (*social environment*) (Haryono 2010).

Dalam era modern, konsep *new museology* dinilai lebih tepat untuk diaplikasikan pada pengembangan museum. Menurut Mairesse dan Desvallées, *new museology* adalah konsep mengenai peran sosial dan politik museum dalam mendorong komunikasi dan gaya berekspresi baru yang bertolak belakang dengan model museum tradisional yang berorientasi pada penyajian koleksi semata. Ross menambahkan, terdapat pergeseran nilai dalam identitas museum yang semula berperan sebagai “*legislator*” menjadi “*interpreter*”, dan menuju ke arah yang berorientasi kepada pengunjung. Menurut Handler, museum modern tidak ubahnya seperti “*social arena*”, karena aktivitasnya lebih dari sekedar pengamatan koleksi oleh pengunjung atau penelitian koleksi oleh akademisi, melainkan beragam aktivitas manusia dilakukan, mulai dari penelitian, konservasi, administrasi, hingga pembuatan berbagai macam program, *event*, restoran, kafe, *merchandise*, dan sebagainya. Huysen lebih lanjut menegaskan bahwa “*museum is no longer simply guardian of treasures and artifacts from the past discreetly exhibited for select group of expert but has moved closer to the world of spectacle of popular fair and mass entertainment*” (McCall, Vikki, dan Gray 2013, diunduh 29 Mei 2015).

Koleksi-koleksi yang dipamerkan di museum merupakan benda hasil kebudayaan manusia. Setiap benda kebudayaan manusia tentunya mempunyai konteks yang dapat menjelaskan asal-usulnya, keadaan sosial budaya yang melatarbelakanginya, proses pembuatan, serta perannya dalam masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, dalam tata pameran modern, dikenal metode pendekatan kontekstual. Pendekatan tersebut menyajikan koleksi yang

ditunjang aspek kontekstualnya, dapat berupa replika, gambar, foto, dan media lainnya. Dengan demikian, koleksi tersebut dapat "bercerita" tentang dirinya secara jelas kepada pengunjung (Udansyah 1978: 12).

Pengaturan lingkungan pada ruang pameran merupakan salah satu cara interpretasi yang tepat apabila tujuan pameran tersebut adalah untuk menempatkan objek pada konteks sosial, budaya, alam, atau sejarah pada satu periode tertentu. Contoh bentuk yang kompleks dari penyajian konteks adalah teknik pendekatan "you are there", yang sering digunakan oleh Museum Sejarah Alam (*Natural History Museum*) di Amerika Serikat (McLean 1993: 23). Pengunjung akan merasakan suasana tertentu yang berkaitan erat dengan objek-objek yang ditampilkan. Misalnya pada ruangan binatang dan habitatnya, ruang pameran akan diatur sedemikian rupa layaknya hutan rimba yang merupakan tempat tinggal berbagai jenis binatang. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman positif dan menyampaikan informasi secara menarik agar dapat dengan mudah dipahami pengunjung. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam penyelenggaraan pameran di museum adalah peran serta manusia, baik pengunjung ataupun pegawai museum. Adanya interaksi sosial yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat dapat mengubah keadaan ruang pameran yang statis menjadi ruang publik yang dinamis (McLean 1993: 21).

Museum merupakan suatu cerminan dari perkembangan sosial yang telah maju (*high level society*). Museum modern sudah seharusnya memiliki fungsi-fungsi yang bersifat khusus, antara lain sebagai lembaga informatif, profesional, sistematis (dalam penanganan koleksi), menyenangkan, dan diakui masyarakat (Edson dan Dean 1994: 13). Kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada publik harus ditingkatkan dengan menyusun program-program menarik yang dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengunjung.

1.2 Pendekatan *Cultural Resources Management*

"*Cultural resources*" atau sumber daya budaya adalah segala sesuatu, ataupun penjumlahan dari sesuatu, yang merupakan khazanah bermakna bagi segala macam upaya yang berkaitan dengan kebudayaan, dalam pengembangannya, perlindungannya, pemanfaatannya, maupun pengkajiannya. *Cultural resources*, baik dalam bentuk *tangible* (tinggalan budaya benda) maupun *intangible* (tinggalan budaya tak benda), tidak dapat dibatasi pengertiannya hanya pada sisi data dan informasi mengenai benda budaya saja, melainkan ia harus juga meliputi sumber-sumber kreatif dan pengambilan keputusan di dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang bersangkutan (Sedyawati 2002: 9-10).

Sulistyanto berpendapat bahwa *Cultural Resources Management* atau dikenal pula dengan istilah Arkeologi Publik merupakan teori atau strategi tentang cara mengelola warisan budaya agar dapat dinikmati manfaatnya sekaligus dipahami maknanya oleh masyarakat. Arkeologi publik adalah ilmu arkeologi yang secara khusus mempelajari interaksi dua arah antara arkeologi dengan publik (masyarakat). Dengan demikian, interpretasi bukan hanya disampaikan oleh kalangan arkeologi kepada publik, melainkan publik juga diharapkan memberikan respon dan masukan kepada kalangan arkeologi dalam proses interpretasi. Interpretasi dua arah ini penting artinya untuk membangun komunikasi secara strategis antara arkeologi sebagai akademisi dengan masyarakat sebagai pengguna warisan budaya (Sulistyanto 2008: 63-64).

Hubungan arkeologi dengan masyarakat sesungguhnya telah lama menjadi perhatian para ahli arkeologi di dunia. Secara kritis, Grahame Clark (1960) mempertanyakan, "*apakah arkeologi layak mendapat dana begitu besar dari masyarakat jika tidak menghasilkan sesuatu yang berguna?*". Menjawab hubungan arkeologi dan masyarakat, Clark menyatakan bahwa arkeologi

layak mendapatkan itu semua jika mampu memuaskan kebutuhan masyarakat saat ini akan pengetahuan yang selalu mereka dambakan, yaitu mengenai asal-usul dan perjalanan sejarah manusia (Tanudirjo 2011: 2).

Hubungan arkeologi dan masyarakat tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Ada banyak aspek yang terlibat di dalamnya, yaitu sosial, budaya, politik, hukum, dan etika. Oleh karena itu, arkeologi membutuhkan strategi yang tepat agar hubungan antara arkeologi dengan masyarakat dapat terjalin secara timbal balik dengan baik dan berkelanjutan. Diperlukan pendekatan yang tepat guna mencapai tujuan bersama kedua belah pihak. Merriman melihat setidaknya ada dua pendekatan atau model untuk memberikan alasan mengenai pentingnya hubungan arkeologi dengan masyarakat, yaitu *deficit model* dan *multiple perspective model* (Tanudirjo 2011: 8).

Model yang pertama didasari anggapan bahwa arkeologi melibatkan masyarakat, maka akan lebih banyak anggota masyarakat yang paham akan arkeologi, dan selanjutnya mereka akan mendukung kegiatan arkeologi. Oleh karena itu, cara yang paling sering dilakukan arkeologi adalah “mendidik” masyarakat agar tahu dan paham arkeologi. Model ini menempatkan ahli arkeologi sebagai penentunya, sehingga mereka berupaya membuat masyarakat mengikuti pandangan yang benar menurut arkeologi. Pada model yang kedua, arkeologi berperan sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat dalam pelestarian maupun interpretasi makna sumber daya arkeologi. Arkeologi menyadari bahwa masyarakat memiliki pandangan yang terkadang berbeda dengan arkeologi. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka semakin banyak pula cara pelestarian dan pemaknaan sumber daya arkeologi. Oleh karena itu, arkeologi bekerja untuk memberikan alternatif pandangan yang diharapkan dapat mencerahkan masyarakat. Jadi, tujuan arkeologi melibatkan masyarakat untuk mendorong kesadaran diri

masyarakat, “memperkaya” kehidupan mereka, serta merangsang refleksi dan daya cipta mereka (Tanudirjo 2011: 8).

Semakin meningkatnya dua kepentingan, yaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan budaya, para arkeolog turut dihadapkan kebutuhan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Pada hakikatnya, arkeolog memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan interpretasi terhadap benda budaya sebagai sesuatu yang dapat menunjukkan identitas bangsanya. Masyarakat harus dapat menangkap nilai yang telah diberikan oleh para arkeolog. Masyarakat harus dapat mengerti bahwa benda yang tersisa itu dapat mengaitkannya dengan nenek moyangnya. Dengan demikian, masyarakat akan memahami identitas dirinya. Demikian pula halnya di museum, seperti yang dikemukakan oleh Hooper-Greenhill bahwa kita harus dapat mengaitkan benda budaya yang dipamerkan kepada hal yang ingin diketahui oleh pengunjung museum (Ramelan 2012: 195-196).

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Industri Bata di Trowulan

Mata pencaharian utama masyarakat Trowulan adalah petani dan pembuat bata. Kedua profesi tersebut merupakan keahlian yang diperoleh secara turun temurun. Karakter wilayah yang *rural* disertai tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan mata pencaharian itu terus dipertahankan. Pada umumnya, masyarakat menutup diri untuk mempelajari keahlian di bidang baru sehingga mata pencaharian yang lain sulit tercipta (Wijayanti 2015, diakses 4 Juni 2015).

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa awal mula masyarakat menekuni profesi pembuat bata dikarenakan ketersediaan sumber bahan baku yang melimpah di tanah Trowulan. Kondisi tanah liat yang baik disertai kandungan bata kuno di dalamnya merupakan kombinasi yang bagus dalam menghasilkan bata yang



Foto 1, 2, 3 dan 4. (Searah jarum jam) Suasana pabrik bata di Trowulan (Foto 1), Suasana pabrik bata di Trowulan (Foto 2), Hasil produksi bata di Trowulan (Foto 3), Kerusakan struktur bata kuno akibat industri bata (Foto 4) (Sumber: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)

kuat dan kokoh. Kualitas bata Trowulan dikenal sangat baik sehingga permintaan pasar terus berdatangan. Dengan demikian, masyarakat berbondong-bondong memproduksi bata secara terus menerus guna meraup sejumlah keuntungan.

Berdasarkan laporan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan, jumlah pabrik bata di wilayah Trowulan dan sekitarnya telah mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu 3000 pabrik bata (Atmodjo dkk. 2008: 37-38). Pendirian pabrik bata tersebut menjamur secara merata di seluruh penjuru Trowulan. Masyarakat mendirikan pabrik bata pada lokasi-lokasi yang disinyalir mengandung bata kuno di dalam ta-nahnya. Umumnya, bata kuno yang masih terkubur itu berupa struktur bangunan, struktur saluran air, atau sumur. Bata kuno Majapahit berukuran lebih besar dibandingkan ukuran bata saat ini, serta kualitasnya amat kuat dan kokoh. Bata-bata kuno tersebut diambil dan kemudian dihancurkan untuk diolah kembali menjadi bata baru.

Lokasi pabrik bata berpindah-pindah berdasarkan ketersediaan bahan bakunya (Wijayanti 2015, diakses 4 Juni 2015). Jika satu lokasi telah dianggap habis kandungan bata kunonya, maka para pembuat bata mencari lokasi baru yang masih terdapat bata kuno di dalamnya. Menurut BPCB Trowulan, kerusakan lapisan tanah yang diduga kuat terdapat struktur atau artefak Majapahit sebagai dampak industri bata diperkirakan mencapai 6,25 hektar per tahunnya (Atmodjo dkk. 2008: 37-38). Dapat dibayangkan betapa cepat proses kehancuran tinggalan budaya seiring berjalannya waktu.

2.2 Pelestarian Warisan Budaya yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Menurut Ardika, warisan budaya mempunyai nilai dan makna simbolis, informatif, estetis, dan ekonomis. Adanya nilai dan makna simbolis karena cagar budaya tersebut merupakan bukti nyata yang dapat menghubungkan dengan berbagai peristiwa masa

lalu. Adapun nilai dan makna informatif meliputi pengetahuan mengenai periode, teknologi, fungsi, serta pandangan individu atau masyarakat pendukungnya. Nilai dan makna estetis meliputi bentuk, jenis, dan teknik pengerjaannya yang menimbulkan daya tarik tersendiri, sedangkan nilai dan makna ekonomis dikarenakan keunikan cagar budaya memiliki pesona yang mampu menarik pengunjung untuk menyaksikannya. Pembangunan sarana penunjang pariwisata di sekitar wilayah situs akan dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat di sekitarnya (Zuraidah 2012: 165-166, diunduh 5 Juni 2015).

Adapun menurut Mulyadi, pelestarian warisan budaya dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dengan kata lain, hakikat

pelestarian warisan budaya adalah suatu kegiatan berkesinambungan yang dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang merupakan pemilik sah warisan budaya tersebut. Nilai manfaat (*use value*) ditujukan untuk pemanfaatan warisan budaya oleh masyarakat yang dilakukan saat ini, antara lain meliputi jatidiri, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Hal yang perlu dipahami adalah keuntungan ekonomi bukanlah tujuan utama dalam pemanfaatan warisan budaya, melainkan merupakan dampak positif dari keberhasilan pelestarian warisan budaya dalam sektor pariwisata (Mulyadi 2014, diakses 5 Juni 2015).

Dalam sejarah pengelolaan warisan budaya di Indonesia, konflik pemanfaatan warisan budaya jarang sekali mendapat perhatian secara serius, baik dari aspek akademis maupun



Foto 5, 6, 7 dan 8. (Searah jarum jam) Candi Bajang Ratu (Foto 5), Candi Brahu (Foto 6), Sisa struktur rumah Majapahit (Foto 7), Candi Tikus (Foto 8) (Sumber: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional)

praktis. Konflik selama ini cenderung lebih dipandang sebagai suatu fenomena yang “biasa” sebagai persoalan klasik yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya warisan budaya, tanpa melihat konteks sosial yang lebih menyeluruh cara pandang yang demikian ini mengakibatkan konflik semakin berkembang dan bertambah rumit, karena semakin banyak pihak terlibat di dalamnya (Sulistyanto 2008: 385).

Tanudirjo mengemukakan bahwa kiblat visi pengelolaan warisan budaya saat ini masih kepada “pengelolaan warisan budaya untuk negara”. Visi tersebut hendaknya diubah menuju visi baru, yaitu “pengelolaan warisan budaya untuk masyarakat”. Mengacu pada visi yang baru, terdapat beberapa fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pengelola warisan budaya, khususnya yang ada di pemerintah (Tanudirjo 2003, diakses 5 Juni 2015).

Sudah semestinya pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahan, serta wadah atau forum untuk berdialog bagi setiap pihak yang terkait dengan warisan budaya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam proses pemberian makna baru bagi sumber daya budaya. Kemudian, karena pengelolaan warisan budaya pada masa mendatang harus memperhatikan manajemen konflik, maka pengelola memegang peran sebagai mediator. Dalam mengemban tugas tersebut, pengelola warisan budaya harus mampu bertindak sebagai manajer konflik yang “netral” sehingga dapat mencari jalan keluar terbaik (*win-win solution*) agar kepentingan berbagai pihak (yang sering amat bertentangan) sedapat mungkin terakomodasi dengan baik (Tanudirjo 2003, diakses 5 Juni 2015).

2.3 Peran Museum Majapahit sebagai Mediator

Museum hadir di tengah masyarakat bertujuan untuk menyampaikan informasi

mengenai koleksi warisan leluhur mereka. Hal tersebut bukan perkara mudah, khususnya pada era modern ini. Selama ini, paradigma museum Indonesia di mata masyarakat adalah gudang berisi barang-barang kuno yang sepi dan membosankan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas museum modern untuk mengubah paradigma “membosankan” menjadi “menarik”.

Dalam konsep *new museology*, museum berperan sebagai “interpreter” yang mampu menginterpretasikan nilai dan makna di balik koleksi dengan cara yang mudah dipahami, interaktif, serta komunikatif. Museum berperan pula sebagai arena sosial yang memfasilitasi berbagai macam program yang bersifat edukatif dan rekreatif. Selain itu, dalam mengatasi konflik pelestarian situs yang terjadi di sekitarnya, museum dapat berupaya menjadi mediator yang membantu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediator didefinisikan sebagai perantara, penghubung, dan penengah (<http://kbbi.web.id>). Dengan demikian, Museum Majapahit perlu berperan sebagai pihak yang menghubungkan atau menengahi pihak-pihak yang bertentangan, yaitu pelestari budaya (pemerintah, arkeolog, akademisi, dan LSM) dan masyarakat Trowulan, khususnya para pembuat bata.

Di samping misi utamanya mencerdaskan bangsa, Museum Majapahit harus dapat merangkul terlebih dahulu masyarakat di sekitarnya. Museum tidak boleh melupakan bahwa sesungguhnya koleksi yang dipamerkan merupakan warisan nenek moyang masyarakat Trowulan sendiri. Salah satu tujuan utama penyampaian informasi yang dilakukan Museum Majapahit adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat setempat bahwa tempat tinggal mereka merupakan tanah yang luar biasa istimewa. Daerah yang mereka tinggali sehari-hari dahulu merupakan pusat kota salah satu kerajaan termahsyur di Nusantara, yaitu Majapahit. Kekuasaannya amat luas,

meliputi sebagian besar wilayah Nusantara yang merupakan cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Poesponegoro dan Notosusanto 2010: 463-464). Penyampaian pesan yang tepat sejatinya akan menumbuhkan rasa kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah kelahirannya, karena sesungguhnya sudah menjadi sifat dasar manusia yakni memiliki rasa ingin tahu terhadap asal-usul mereka, “*siapakah nenek moyang saya?*”. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta “ikatan batin” yang kuat di antara masyarakat Trowulan kini dengan peninggalan nenek moyang. Perasaan itulah yang dapat menjadi motivasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi benda-benda cagar budaya yang terdapat di Trowulan.

Dalam melakukan pendekatan, Museum Majapahit perlu mengenal dan mempelajari terlebih dahulu karakteristik serta kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Alasan utama masyarakat Trowulan berbondong-bondong mendirikan pabrik bata dikarenakan faktor ekonomi yang lemah. Tanah Trowulan menyediakan sumber daya bata yang melimpah. Masyarakat memanfaatkan bata kuno tersebut untuk diolah kembali menjadi bata baru, padahal bata kuno itu merupakan peninggalan masyarakat Majapahit yang bisa saja merupakan struktur candi, hunian tempat tinggal, saluran air, atau bangunan lainnya. Penggunaannya sebagai bahan baku di dalam industri bata amat disayangkan, karena upaya rekonstruksi sejarah masa lalu menjadi terhambat dan sulit dilakukan. Namun, para pelestari budaya tidak boleh memiliki egoisme yang tinggi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan harus dinomorsatukan. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditempuh harus bersifat *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dikalahkan.

Kesejahteraan masyarakat sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia. Museum Majapahit, sebagai salah satu agen pemerintah, tentunya turut berperan serta dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah. Kesejahteraan batiniah dapat diperoleh, salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan akan pemahaman identitas dan jati diri. Untuk kesejahteraan lahiriah dapat diperoleh melalui kebutuhan ekonomi yang meliputi sandang, pangan, dan papan.

Masyarakat perlu memahami bahwa situs yang lestari dapat memberikan manfaat yang positif terhadap aspek ideologis, akademis, dan ekonomis. Manfaat aspek ideologis yaitu sebagai penguat jati diri bangsa, manfaat akademis yaitu sebagai pengetahuan yang dipelajari, serta manfaat ekonomis yaitu sebagai objek wisata yang mampu mendatangkan wisatawan. Guna mencapai tujuan tersebut, Museum Majapahit dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat Trowulan melalui kombinasi *deficit model* dan *multiple perspective model* yang terdapat dalam teori *cultural resources management*.

Dalam kaitannya dengan *deficit model*, museum bekerja sebagai lembaga yang mendidik masyarakat mengenai kearifan masyarakat Majapahit di masa lampau. Museum diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai arti penting situs bagi masyarakat Trowulan. Di antara seluruh metode penyajian, pameran merupakan kunci utama keberhasilan museum, karena pameran merupakan hal yang pertama kali dilihat seseorang ketika mengunjungi museum. Pameran Museum Majapahit sebaiknya mengikuti *trend* perkembangan tata pameran yang lebih terkini. Saat ini, pameran tidak lagi bersifat *object oriented* yang sekedar memajang koleksi di dalam vitrin layaknya perhiasan mahal di toko emas, melainkan pameran bersifat *people oriented* yakni mengeksplorasi nilai di balik koleksi sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan kepada masyarakat. Museum dapat menggunakan metode pendekatan

kontekstual sebagai bentuk interpretasi dalam menempatkan koleksi pada konteks sosial, budaya, dan lingkungan pada zaman Majapahit. Pengetahuan mengenai kondisi sosial, budaya, dan lingkungan Majapahit dapat diketahui melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para arkeolog. Hasil penelitian tersebut antara lain telah mengungkapkan rekonstruksi rumah penduduk Majapahit, jalur-jalur kanal yang membentang di wilayah Trowulan, komoditi tembikar yang diperjualbelikan di pasar Majapahit, serta komoditi keramik yang didatangkan (*import*) dari luar negeri. Perancang pameran (*exhibit designer*) dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan pameran yang bersifat kontekstual. Perlu diperhatikan bahwa demi mencapai pameran yang berestetika tinggi, tidak boleh melampaui fakta sejarah yang ada. Melalui pameran yang bersifat kontekstual, pengunjung diharapkan dapat merasakan dan membayangkan suasana kehidupan pada masa Majapahit di abad ke-14 hingga 15. Tujuan pengalaman tersebut adalah menciptakan pameran yang menarik sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh pengunjung.

Pendekatan *deficit model* dapat pula diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan dikemas secara rekreatif, seperti pengenalan sejarah Majapahit, pengenalan koleksi museum, pemutaran film fiksi ilmiah dan dokumenter, seminar, penyuluhan pelestarian situs, serta permainan teka-teki "harta karun" dengan cara menelusuri koleksi-koleksi museum. Sasaran kegiatan tersebut adalah masyarakat Trowulan pada umumnya, namun lebih ditekankan kepada para siswa pendidikan dasar dan menengah di Trowulan. Hal tersebut dikarenakan penanaman nilai-nilai positif sebaiknya dilakukan pada usia sedini mungkin agar pesan-pesan di balik pentingnya kelestarian situs dapat lebih mudah diserap dan dipahami. Selain itu, pada umumnya

para siswa mempunyai jiwa dan semangat yang masih idealis sehingga diharapkan mampu memberi dukungan terhadap upaya pelestarian situs. Penanaman nilai tersebut diharapkan dapat memupuk kecintaan serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat Trowulan terhadap nenek moyang mereka. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap kelestarian situs dapat tumbuh dengan sendirinya.

Selain itu, Museum Majapahit dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan semacam pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk mengasah ketrampilan masyarakat di bidang industri kecil lainnya, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan arca, pembuatan manik-manik, dan pembuatan panganan khas daerah. Workshop lainnya adalah mengenai kepariwisataan yang terkait dengan objek-objek wisata di Situs Trowulan. Tujuannya untuk memberikan bekal ilmu kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama pendanaan kegiatan, sponsor, atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di lokasi museum.

Museum Majapahit diharapkan dapat berperan sebagai agen penggerak komunitas sesuai dengan prinsip *new museology*. Museum diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi serta penyelenggara program-program rekreatif-edukatif yang melibatkan peran serta masyarakat. Museum juga menyediakan pusat pelayanan terpadu yang menampung segala macam bentuk laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan cagar budaya di Trowulan, seperti penemuan artefak dan pelaporan kerusakan cagar budaya. Berkaitan dengan penemuan artefak, museum perlu memikirkan besaran intensif yang setimpal guna mengantisipasi penjualan artefak kepada kolektor benda antik.

Sementara itu, *multiple perspective model* dapat diaplikasikan dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan Situs

Trowulan melalui pemahaman dan interpretasi mereka. Salah satu caranya adalah Museum Majapahit membuka kesempatan bagi warga Trowulan untuk mengembangkan bakatnya sebagai *citizen journalist* (jurnalis warga). Masyarakat dapat menuangkan pemikirannya atau bahkan melaporkan isu-isu hangat yang terkait dengan cagar budaya yang tengah terjadi di wilayah Trowulan. Masyarakat dapat mengekspresikan pemikiran serta menginterpretasikan pemaknaan sumber daya budaya di Trowulan melalui kacamata mereka, karena sudut pandang masyarakat tidak selalu sama dengan para arkeolog. Melalui wadah tersebut, masyarakat akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya. Warta masyarakat yang dinilai penting dapat segera disampaikan oleh museum kepada media daerah, baik media cetak maupun media elektronik. Bagi tulisan yang dinilai bagus dan lolos seleksi akan dimuat di dalam terbitan museum yang terbit secara berkala. Tentunya akan diberikan pemberian intensif bagi masyarakat yang menyumbangkan buah pemikirannya tersebut.

Kelestarian Situs Trowulan akan menciptakan pesonanya tersendiri. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan nilai ekonomis di balik daya tarik Trowulan melalui pengembangan sektor pariwisata. Dengan demikian, masyarakat diharapkan segera mengubah sudut pandang mata pencahariannya, dari yang semula bergantung pada ketersediaan sumber bata menjadi bergantung pada kelestarian situs yang dapat mendatangkan kunjungan wisatawan. Meningkatnya kunjungan wisatawan akan sejalan dengan meningkatnya pendapatan ekonomi daerah. Masyarakat dapat mulai memikirkan lapangan pekerjaan yang menunjang sektor pariwisata, seperti jasa penginapan, transportasi, paket wisata, kuliner, serta sentra kerajinan dan oleh-oleh. Hal tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik berupa moral dan materi, agar masyarakat menaruh minat besar terhadap

pengembangan sektor pariwisata. Dengan demikian, masyarakat akan meninggalkan profesi lamanya sebagai pembuat bata.

Masyarakat perlu memahami bahwa demi mencapai kesejahteraan bersama tidak dapat ditempuh melalui jalan yang instan. Diperlukan kesabaran, ketekunan, serta keuletan di dalam mengelola suatu mata pencaharian yang baru. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pengelolaan objek wisata berbasis pelestarian bersifat jangka panjang untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan profesi pembuat bata yang bersifat terbatas dan bergantung pada ketersediaan sumber bahan baku. Perlu menjadi catatan bahwa pemanfaatan nilai ekonomis terhadap Situs Trowulan harus berbasis kepada pelestarian, sehingga dapat menjadi suatu solusi yang bersifat *win-win solution* bagi masyarakat dan para pelestari budaya. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomis yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, sedangkan di sisi lain, cagar budaya dapat terus lestari hingga masa yang akan datang.

3. Penutup

Museum Majapahit merupakan salah satu perpanjangan tangan pemerintah yang sangat strategis dalam menyentuh dan merangkul masyarakat setempat dalam menengahi permasalahan yang terjadi di Trowulan. Museum berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak pelestari budaya dan pihak industri pembuatan bata. Museum bertugas sebagai lembaga pendidik yang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai kearifan serta kejayaan masyarakat Majapahit pada masa lampau sehingga menumbuhkan rasa bangga akan asal-usul nenek moyang. Selain itu, Museum Majapahit bergerak sebagai “agen penggerak komunitas” yang menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai program positif bagi masyarakat Trowulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan tiga implikasi kebijakan. Pertama, pelestarian warisan budaya yang dilakukan perlu didasari prinsip *cultural resources management* yang memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat, yaitu meliputi nilai ideologis bagi penguatan jatidiri bangsa, nilai akademis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta nilai ekonomis bagi pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Kedua, Museum Majapahit merupakan salah satu UPT strategis yang harus dilibatkan di dalam Badan Pengelola KCBN Trowulan apabila nanti terbentuk. Salah satu tugas yang diemban adalah sebagai mediator yang menjembatani kepentingan masyarakat dan pelestari budaya melalui program museum. Ketiga, pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat yang merupakan kunci utama keberhasilan pelestarian situs. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, maka kelestarian situs akan sulit dicapai. Menanamkan kesadaran tersebut bukanlah perkara mudah. Perlu upaya yang dilakukan secara repetitif dan dilakukan sedini mungkin.

Walaupun saat ini kondisi keutuhan cagar budaya di Trowulan sudah memprihatinkan, namun tidak ada kata terlambat. Pemikiran-pemikiran mengenai upaya penyelamatan situs harus tetap dihasilkan agar dapat memberikan rekomendasi bagi para penentu kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud Thoha, M.A., APU selalu pembimbing KTI dalam Diklat Jabatan Fungsional Peneliti (DJFP) Tingkat Pertama Gelombang X Tahun 2015 yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan karya tulis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bidang Data dan Informasi Pusat Arkeologi Nasional atas dokumentasi foto yang ditampilkan dalam karya tulis.

Daftar Pustaka

- Asiarto, Luthfi. 2007. "Museum dan Pembelajaran". *Museografia: Museum dan Pendidikan* 1 (1): 5–14.
- Atmodjo, Junus Satrio, dkk. 2008. *Kajian Integratif Perlindungan dan Pengembangan "Situs Kerajaan Majapahit" di Trowulan*. Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Edson, Gary dan David Dean. 1994. *The Handbook for Museum*. London: Routledge.
- Haryono, Daniel. 2010. *Museum Ullen Sentalu: Penerapan Museum Baru*. Tesis. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- McLean, Kathleen. 1993. *Planning for People in Museum Exhibitions*. Washington: Association of Science-Technology Centers.
- Mulyana, Slamet. 2006. *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: PT LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramelan, Djuwita Wiwin. 2012. *Permasalahan Pengelolaan Cagar Budaya dan Kajian Manajemen Sumber daya Arkeologi*. Dalam Supratikno Rahardjo (Ed.). *Arkeologi untuk Publik* Buku I. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. hlm 186-199.
- , dkk. 2015. "Model Pemanfaatan Cagar Budaya Trowulan Berbasis Masyarakat", dalam Amerta: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* Vol. 33 No.1. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, hlm 63-76.
- Sedyawati, Edi. 2002. *Pembagian Peran dalam Pengelolaan Sumber daya Budaya*. Dalam I Made Sutaba dkk. (Ed.). *Manfaat Sumber Daya Arkeologi untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*. Denpasar: PT. Upada Sastra, hlm 9-14.
- Sulistyanto, Bambang. 2008. *Resolusi Konflik dalam Manajemen Warisan Budaya Situs Sangiran*. Disertasi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

- Sutaarga, Mochamad Amir. 1983. *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum*. Jakarta: Direktorat Permuseuman Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2011. Arkeologi dan Masyarakat. Dalam Sumijati Atmosudiro dan Tjahjono Prasodjo (Ed.). *Arkeologi dan Publik*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta, hlm 2-12.
- Udansyah, Dadang. 1978. *Pedoman Tata Pameran di Museum*. Jakarta: Proyek Peningkatan dan Pengembangan Permuseuman Jakarta.
- Sumber online**
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2014. Sosialisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan di Museum Majapahit. (kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbthrowulan/2014/05/05/sosialisasi-kawasan-cagar-budaya-nasional-trowulan-oleh-direktorat-pelestarian-cagar-budaya-dan-permuseuman-di-museum-majapahit/, diakses 17 April 2015).
- <http://kbbi.web.id/mediator>. diakses 29 Mei 2015.
- McCall, Vikki dan Clive Gray. 2013. "Museums and the New Museology: Theory, Practice, and Organisational Change". *Museum Management and Curatorship* 29 (1): 1-17. (<http://dx.doi.org/10.1080/09647775.2013.869852>, diunduh 29 Mei 2015).
- Mulyadi, Yadi. 2014. Pemanfaatan Cagar Budaya dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundangan. Disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, 20 Agustus 2014. (http://www.academia.edu/8128325/Pemanfaatan_Cagar_Budaya_dalam_Perspektif_Akademik_dan_peraturan_perundangan, diakses 5 Juni 2015).
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. Warisan Budaya untuk Semua: Arah Kebijakan Pengelola Warisan Budaya Indonesia di Masa Mendatang. Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 2003. (arkeologi.fib.ugm.ac.id, diakses 5 Juni 2015).
- Wijayanti, Dyah Retno. Musnahnya Peninggalan Sejarah di Tanah Sendiri: Kondisi Sosial Ekonomi dan Kultural Masyarakat Trowulan, Potensi atau Masalah? (http://www.academia.edu/10946788/Musnahnya_Peninggalan_Bersejarah_di_Tanah_Sendiri_Kondisi_Sosial_Ekonomi_dan_Kultural_Masyarakat_Trowulan_Potensi_atau_Masalah, diakses 4 Juni 2015).
- Zuraidah. Pembangunan Pusat Informasi Majapahit: Upaya Pemasarakatan Tinggalan Arkeologi di Situs Trowulan. (www.isjd.pdii.lipi.go.id, diunduh 5 Juni 2015).